



## GOVERNMENT'S COMMITMENT TO SPENDING THE CLEAN WATER AND SANITATION IN REDUCING STUNTING IN ROTE NDAO REGENCY

### *Komitmen Pemerintah Pada Belanja Air Bersih dan Sanitasi Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rote Ndao*

Safira Aura Ramadhani

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana

\*Alamat Korespondensi: [shafira.ramadhani@yahoo.com](mailto:shafira.ramadhani@yahoo.com)

#### Article Info

##### Article History

Received: 20 Maret 2022

Revised : 01 April 2022

Accepted : 08 April 2022

##### Keywords :

Government's commitment, stunted, clean water, sanitation, DHA

##### Kata kunci :

Komitmen daerah, stunting, air bersih, sanitasi, DHA

#### ABSTRACT / ABSTRAK

*Stunting decline in 2020 to 25.83% which made Rote Ndao Regency ranked the best category 1 for stunting reduction at the National level and the best 1 for category of reducing stunting in NTT, government commitment is needed in implementing integrated stunting reduction, one of which sensitive interventions is clean water and sanitation. This commitment can be measured from legal, policy, and budgetary indicators, and in analyzing commitments based on health spending, needed an instrument like a District Health Account (DHA). This study aims to determine the government's commitment related to spending on clean water and sanitation programs in preventing stunting in Rote Ndao Regency. The type of research used is descriptive research. The data collection technique is by reviewing documents related to the budget spent on clean water and sanitation in reducing stunting rates. Analysis data in descriptive using the pivot table feature in Microsoft Excel with four dimensions of DHA, namely sources of financing, financing managers, types of activities, and budget items. The results showed that total of spending clean water and sanitation in stunting prevention was Rp. 12,193,683,350, - and it's known that the government of Rote Ndao Regency is committed to the availability of 5 indicators, including budget availability, cross-sectoral cooperation, clean water and sanitation activities, and availability of regulations.*

Penurunan *stunting* pada tahun 2020 menjadi 25.83% yang membuat Kabupaten Rote Ndao mendapat peringkat kategori terbaik 1 untuk aksi penurunan *Stunting* tingkat Nasional, sekaligus terbaik 1 untuk kategori penurunan prevalensi *Stunting* se-provinsi NTT. Komitmen pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan penurunan *stunting* terintegrasi salah satunya pada intervensi sensitif air bersih dan sanitasi. Komitmen tersebut dapat diukur dari indikator hukum, kebijakan, serta anggaran, dan dalam menganalisis komitmen berdasar belanja kesehatan diperlukan instrumen *District Health Account* (DHA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen pemerintah yang berkaitan dengan belanja program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan telaah dokumen terkait anggaran yang dibelanjakan untuk keperluan air bersih dan sanitasi dalam penurunan angka *stunting*. Analisis data dalam bentuk deskriptif menggunakan fitur *pivot table* dalam *microsoft excel* dengan empat dimensi DHA yaitu sumber pembiayaan, pengelola pembiayaan, jenis kegiatan, serta mata anggaran. Hasil penelitian menunjukkan total belanja air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* berjumlah Rp. 12.193.683.350,- dan diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen dengan tersedianya 5 indikator antara lain tersedianya anggaran, kerjasama lintas sektor, adanya kegiatan air bersih dan sanitasi, serta tersedianya regulasi.

## PENDAHULUAN

*Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak (pertumbuhan otak dan tubuh) akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan berpikir (Bupati Rote Ndao, 2020). Hingga tahun 2019, provinsi NTT masih dalam peringkat tertinggi kejadian *Stunting* yaitu sebesar 43.82% (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao sebesar 43.3% pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 25.83% (Ndao, 2020). Hal inilah yang membuat Kabupaten Rote Ndao mendapat peringkat kategori terbaik 1 untuk aksi penurunan *Stunting* tingkat Nasional, sekaligus terbaik 1 untuk kategori penurunan prevalensi *Stunting* se-provinsi NTT. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mempunyai komitmen intervensi penurunan *Stunting* terintegrasi lintas sektor dengan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi (spesifik dan sensitif) (Dinkes Rote Ndao, 2020).

Intervensi spesifik (langsung) digunakan untuk menangani penyebab langsung terjadinya kurang gizi, biasanya intervensi ini dilaksanakan oleh sektor kesehatan, sedangkan intervensi sensitif (tidak langsung) digunakan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, biasanya dilakukan melalui berbagai sektor yang umumnya berada diluar sektor kesehatan salah satunya adalah intervensi air bersih dan sanitasi (United Nation Children's Fund (UNICEF), 2020)

Menurut penelitian Torlesse (2016) menyatakan bahwa terdapat interaksi atau hubungan antara fasilitas sanitasi rumah tangga dan pengolahan air terhadap kejadian *stunting* (Torlesse *et al.*, 2016). Sanitasi yang buruk juga merupakan faktor terjadinya kejadian *stunting* terkait dengan munculnya penyakit infeksi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi dapat mempengaruhi status gizi *stunting* pada balita yaitu melalui penyakit infeksi yang dialami contohnya kejadian diare. Kasus diare sebesar 88% disebabkan karena kualitas sumber air minum yang buruk (Sinatrya & Muniroh, 2019). Intervensi yang dijalankan pemerintah terkait

indicator air bersih dan sanitasi yaitu diharapkan tersedianya cakupan air bersih dan sanitasi yaitu cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak (TNP2K, 2018a). Tentunya dalam pelaksanaan intervensi di lapangan perlu adanya dana atau alokasi anggaran dari pemerintah baik pusat, daerah, ataupun desa.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk melihat komitmen pemerintah dalam hal pembiayaan kesehatan adalah *District Health Account*. *District Health Account* (DHA) merupakan suatu cara pemantauan yang sistematis, komprehensif, serta konsisten terkait pemanfaatan aliran dana dalam sistem kesehatan. *Health Account* akan memberikan informasi yang mendalam tentang aliran dana dan belanja dalam sebuah penyelenggaraan program kesehatan. Begitupun dengan indikator air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao. Dengan adanya *Health Account*, dapat diketahui sumber dana hingga manfaat dana tersebut dalam program yang dijalankan pemerintah, termasuk upaya intervensi sensitif maupun spesifik atau upaya konvergensi dalam penanggulangan *stunting*, dengan begini dapat terlihat seberapa besar realisasi belanja pada program indikator tersebut (Supriyanto, Ernawaty and Budi, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komitmen pemerintah yang berkaitan dengan belanja program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao.

## BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim LH Kabupaten Rote Ndao, NTT dengan waktu penelitian mulai dari bulan November hingga Desember 2021.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kebijakan baik regulasi dan anggaran yang dibelanjakan untuk program air bersih dan sanitasi

dalam rangka penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan telaah dokumen terkait anggaran yang dibelanjakan untuk keperluan air bersih dan sanitasi dalam penurunan angka *stunting*. Analisis data dalam bentuk deskriptif menggunakan fitur

*pivot table* dalam *microsoft excel* dengan empat dimensi *health account* yaitu sumber pembiayaan, pengelola pembiayaan, jenis kegiatan, serta mata anggaran. Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan penjelasan dalam bentuk narasi.

## HASIL

### Komitmen Pemerintah pada Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao.

**Tabel 1. Perbandingan APBD, Total Belanja peruntukkan *Stunting*, dan Belanja Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting***

Total APBD (Rp)	Penanggulangan <i>Stunting</i> (Rp)	%	Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi (Rp)	%
753,647,401,000	64,276,260,286	8.53	12,193,683,350	18.97

Sumber: Data Sekunder 2020

Berdasarkan tabel 1 diketahui total belanja penanggulangan *stunting* dari seluruh sektor integrasi sebesar 8.53% dari total APBD dan 18.97% diperuntukkan untuk belanja air bersih dan sanitasi dari total belanja penanggulangan

*stunting* yang dikelola oleh instansi dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta dinas kawasan permukiman dan lingkungan hidup.

**Tabel 2. Ketersediaan Indikator Komitmen Pemerintah pada Program Air Bersih dan Sanitasi dalam penanggulangan *Stunting***

Indikator	Ada/tidak	Keterangan
Tersedia Anggaran	Ada	DPA Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim&LH
Adanya kegiatan Air Bersih	Ada	Pembangunan jaringan perpipaan
Adanya kegiatan sanitasi	Ada	Pembangunan tangki septik dan TPS
Kerjasama lintas sektor	Ada	Kerjasama dinas PUPR dan Perkim LH
Tersedianya regulasi	Ada	Perbup No. 21 Tahun 2020

Tabel 2 menunjukkan dari kelima indikator komitmen pemerintah, semua indikator tersedia dalam perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Tersedianya anggaran yang berasal dari APBD dalam bentuk PAD, DAK, dan DAU yang dirincikan dalam DPA Instansi sebesar Rp. 12,193,683,350. Kerjasama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam integrasi konvergensi penurunan *stunting*. Instansi yang memegang peranan dalam intervensi air bersih dan sanitasi

adalah dinas kesehatan, dinas PUPR dan Perkim LH. Kegiatan air bersih dan sanitasi yang dilakukan antara lain pembangunan tangki septik berskala individu pedesaan, pembangunan jaringan perpipaan untuk SPAM, serta pembangunan TPS 3R. Kegiatan intervensi air bersih dan sanitasi ini sudah tercantum dalam Peraturan Bupati No. 21 tahun 2020 tentang percepatan dan penanganan *stunting* terintegrasi, yang didalamnya terdapat penegasan bahwa akses air bersih dan sanitasi

harus disediakan dan dipastikan untuk sasaran lokus *stunting*.

### Analisis Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao

**Tabel 3. Distribusi Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting* Berdasarkan Sumber Pembiayaan**

Sumber Pembiayaan	Belanja (Rp.)	%
<b>A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</b>		
1. Dana Alokasi Khusus (DAK)	9,540,311,000	78.24
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	29,300,000	0.24
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,624,072,350	21.52
<b>Total</b>	<b>12,193,683,350</b>	<b>100</b>

Tabel 3 menunjukkan pada dimensi sumber pembiayaan, semua anggaran berasal dari pemerintah daerah yang terbagi atas 3 yaitu dana alokasi khusus (78.24%), pendapatan asli daerah (21.52%), serta dana alokasi umum (0.24%). Dana

alokasi khusus lebih dominan dan menempati proporsi terbesar dalam belanja program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting*.

**Tabel 4. Distribusi Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting* Berdasarkan Pengelola Anggaran**

Pengelola Anggaran	Belanja (Rp)	Persentase (%)
1. Dinas Kesehatan	130,00,0000	1.07
2. Dinas Perkim dan LH	5,765,101,000	47.28
3. Dinas PUPR	6,298,582,350	51.65
<b>Total</b>	<b>12,193,683,350</b>	<b>100</b>

Tabel 4 menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan oleh tiga instansi dengan program dan kegiatan masing-masing instansi, dimana dinas PUPR dengan 51.65% yang memegang peran utama dalam kegiatan air bersih dan sanitasi serta dinas Perkim&LH dengan 47.28%, dan dinas kesehatan dengan 1.07%.

Tabel 5 menunjukkan bahwa dalam belanja air bersih dan sanitasi sebagian besar digunakan untuk belanja kegiatan langsung (92.87%) dibandingkan dengan belanja kegiatan tidak langsung (7.13%). Hal ini berkaitan dengan kegiatan sanitasi baik yang bersifat komunal maupun individual seperti pembangunan tangki

septik, jaringan perpipaan, serta tempat pengolahan sampah 3R.

Tabel 6 menunjukkan bahwa belanja tertinggi ada pada input operasional berupa pelaksanaan program sanitasi desa yang merupakan belanja tertinggi pada operasional dengan 30.27%. Tabel di atas juga menunjukkan, input investasi tidak berbeda signifikan dengan operasional. Investasi jangka panjang ini berupa pembangunan TPS dan pembangunan SPAM yang masing-masing memegang peranan penting dalam program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting*.

**Tabel 5. Distribusi Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan Stunting Berdasarkan Jenis Kegiatan**

Jenis Kegiatan	Belanja (Rp.)	%
<b>A. Kegiatan Tidak Langsung</b>		
1. Manajerial dan koordinasi (administrasi perkantoran)	5,474,350	0.04
2. Perencanaan dan Penganggaran Program	13,260,000	0.11
3. Rapat koordinasi	50,929,000	0.42
4. Pengelolaan Program	158,161,000	1.30
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	641,881,000	5.26
<b>Total</b>	<b>869,705,350</b>	<b>7.13</b>
<b>B. Kegiatan Langsung</b>		
1. Pembangunan tangki septik	3,691,479,000	30.27
2. Pembangunan jaringan perpipaan	3,929,000,000	32.22
3. Penyediaan Sarana Air Minum	2,090,000,000	17.14
4. Pembangunan TPS 3R	1,613,499,000	13.23
<b>Total</b>	<b>11,323,978,000</b>	<b>92.87</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>12,193,683,350</b>	<b>100</b>

**Tabel 6. Distribusi Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan Stunting Berdasarkan Mata Anggaran**

Mata Anggaran	Belanja (Rp.)	%
<b>A. Investasi</b>		
1. Pembangunan TPS	1,613,499,000	13.23
2. Pembangunan SPAM	4,124,088,000	33.82
<b>Total</b>	<b>5,737,587,000</b>	<b>47.05</b>
<b>B. Operasional</b>		
1. Akomodasi	38,703,000	0.32
2. Honorarium	190,001,000	1.56
3. Perjalanan	433,628,000	3.56
4. Media cetak/publikasi massa (Poster, baliho, leaflet)	2,294,400	0.02
5. Penggandaan / Fotocopy/cetak format/materi penyuluhan	3,178,000	0.03
6. ATK	6,812,950	0.06
7. Pelaksanaan Program (Pamsimas)	2,090,000,000	17.14
8. Pelaksanaan program (Sanitasi Desa)	3,691,479,000	30.27
<b>Total</b>	<b>6,456,096,350</b>	<b>52.95</b>
<b>C. Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total (A+B+C)</b>	<b>12,193,683,350</b>	<b>100</b>

## PEMBAHASAN

**Komitmen pemerintah pada belanja program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao.**

Pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional (stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan

prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi (TNP2K, 2018b).

Merujuk pada regulasi tersebut, pemerintah daerah berkomitmen dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Rote Ndao No.

21 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi. Dalam perbup tersebut memuat penjelasan terkait air bersih dan sanitasi yaitu pada pasal 29 ayat 8 tentang pelaksanaan yang berbunyi Pemerintah desa/kelurahan wajib menerapkan sanitasi lingkungan secara baik di wilayah masing-masing dengan terdiri dari 6 item yakni: memiliki program Desa Stop Buang Air Sembarangan, memiliki sarana cuci tangan pakai sabun di tempat umum, memiliki jamban umum, membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, setiap kepala keluarga di Desa/Kelurahan wajib memiliki jamban keluarga, serta setiap warga desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan (Bupati Rote Ndao, 2020).

Percepatan penurunan *stunting* harus dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi dan sinkronisasi. Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor dalam mewujudkan hal tersebut. Kerjasama lintas sektor antara lain Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman Lingkungan Hidup.

Program air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kegiatan pada intervensi sensitif. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas kesehatan, dinas PUPR, dan dinas Perkim&LH. Dinas kesehatan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan PHBS, sehingga dapat mengubah perilaku buruk mereka. Sedangkan pada Dinas PUPR dan Perkim & LH lebih merujuk pada pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan SPAM, TPS 3R, serta tangki septik beserta jamban sehat.

Pembangunan tersebut bersifat komunal dan individual. Total belanja dalam penanggulangan *stunting* sebesar Rp. 64,276,260,286,- dari total APBD Kabupaten Rote

Ndao tahun 2020. Dari total belanja tersebut, Rp. 12,193,683,350,- dipergunakan untuk belanja air bersih dan sanitasi pada tiga instansi yang telah dijelaskan. Berdasarkan aksi 8 konvergensi yaitu reviu *stunting*, capaian output air bersih dan sanitasi yang telah dilakukan mencapai 91% dengan realisasi anggaran hingga 98%.

Berdasarkan penelitian Syafrina (2019), ditemukan bahwa dari 12 indikator *NCI* dalam mengukur komitmen, 6 diantaranya sudah dijalankan. Berarti komitmen pemerintah Padang Pariaman terhadap masalah *Stunting* sudah cukup baik (Syafrina, Masrul and Firdawati, 2019). Pada penelitian ini, terdapat 5 indikator dan semua indikator telah terlaksana dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah berjalan dengan baik.

### **Belanja Program Air Bersih dan Sanitasi dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Rote Ndao**

Pada belanja program air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* berasal dari APBD dengan terbagi dalam dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta pendapatan asli daerah. Sebagian besar kegiatan air bersih dan sanitasi berupa pembangunan atau bersifat fisik, sehingga banyak menggunakan dana alokasi khusus. Dana tersebut dikelola oleh setiap instansi yang memegang peranan dalam indikator air bersih dan sanitasi untuk penanggulangan *stunting*.

Instansi atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim dan LH. Pada Dinas Kesehatan mendapat biaya lebih sedikit dibandingkan dua instansi lainnya dikarenakan kegiatan yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi yang dipegang oleh Dinas Kesehatan lebih mengarah kepada pemberdayaan masyarakat seperti pemucuan yaitu pendekatan kepada masyarakat guna memberikan masyarakat pemahaman terkait sanitasi. Masyarakat diharapkan sadar akan pentingnya sanitasi dan merasa butuh akan sanitasi yang baik guna

kesehatan mereka, sehingga dapat mengubah pola pikir mereka dan mengambil tindakan terkait BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Penelitian yang dilakukan oleh Badriyah (2017) membuktikan bahwa perilaku membuang air besar (kotoran) sembarangan dapat menyebabkan kualitas tanah menurun serta mengganggu kualitas air tanah yang jika tidak diperhatikan maka dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat sekitar seperti kecacingan, diare, dan sebagainya yang jika dibiarkan maka berdampak pada kekurangan gizi berupa *stunting* pada anak balita (Badriyah and Syafiq, 2017). Untuk itu, dengan dibangunnya sarana sanitasi dapat menghentikan perilaku buang air besar sembarangan dan dapat mencegah terjadinya *stunting* di desa lokus *stunting*.

Selain itu, kegiatan inspeksi sarana air bersih yang dilakukan pada beberapa sarana air bersih seperti sumur gali, penampungan air hujan (PAH), dan air ledeng. Pelaksanaan inspeksi tersebut pada lingkup kerja tiap puskesmas lokus *stunting*. Intervensi air bersih dan sanitasi merupakan salah satu tujuan SDGs (*sustainable development goals*) dari pemerintah pusat, seluruh masyarakat diharapkan dapat mengakses air bersih dan sanitasi layak.

Oleh karena itu, air bersih dan sanitasi merupakan salah satu faktor sensitive terjadinya *stunting* pada anak. Dengan buruknya sanitasi, maka dapat memicu perkembangbiakan vector pembawa penyakit sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit infeksi seperti diare yang jika infeksi tersebut dalam jangka waktu lama dapat menurunkan gizi pada anak sehingga berdampak pada *stunting*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah telah berjalan dengan baik atas terlaksananya lima indikator yaitu tersedia regulasi, kerjasama lintas sektor, air bersih dan sanitasi, serta anggaran.

Realisasi anggaran untuk air bersih dan sanitasi sebesar 98% dengan analisis belanja

kesehatan pada indikator air bersih dan sanitasi dalam penanggulangan *stunting* sebesar Rp. 12.193.683.350,- dan sumber pembiayaan berasal dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta pendapatan asli daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Petugas instansi yang sudah membantu dalam memberikan data sekunder untuk kepentingan peneliti guna kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, L. and Syafiq, A. (2017) 'The Association Between Sanitation , Hygiene , and Stunting in Children Under Two-Years ( An Analysis of Indonesia ' s Basic Health Research , 2013 ) The Association Between Sanitation , Hygiene , and Stunting in Children Under Two-Years ( An Analysis of', 21(2). doi: 10.7454/msk.v21i2.6002.
- Bupati Rote Ndao (2020) 'Perbup Rote Ndao No 21 Tahun 2020'.
- Dinkes Rote Ndao (2020) '01\_Analisis Situasi (Aksi 1)-Bapelitbang Rote'.
- Kementerian Kesehatan RI (2019) 'Profil Kesehatan Indonesia'.
- Ndao, P. K. R. (2020) *Data Stunting di Kabupaten Rote Ndao*. Available at: <https://rotendaokab.go.id/data-stunting-di-kabupaten-rote-ndao.php> (Accessed: 23 February 2021).
- Supriyanto, S., Ernawaty and Budi, F. (2018) *Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan*.
- Syafrina, M., Masrul, M. and Firdawati, F. (2019) 'Analisis Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), p. 233. doi: 10.25077/jka.v8i2.997.
- TNP2K (2018a) 'Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting Buku Pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)', *TNP2K sekretariat wakil presiden Republik*

*Indonesia*, p. 96.

TNP2K (2018b) 'Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (National Strategy for Accelerating Stunting Prevention 2018-2024)', *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia*, (November), pp. 1–32. Available at: <http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakor>

nis 2018/Sesi  
1\_01\_RakorStuntingTNP2K\_Stranas\_22Nov  
2018.pdf.

Torlesse, H. *et al.* (2016) 'Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction', *BMC Public Health*, 16(1). doi: 10.1186/s12889-016-3339-8.